

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Perkembangan Inflasi Sulsel

Pada triwulan II 2026, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi 0,36% (mtm), lebih rendah dari periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm) pada triwulan I 2026. Dengan perkembangan tersebut, laju inflasi Sulsel sampai dengan triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,54% (ytd) dengan inflasi tahunan sebesar 3,56% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Nasional yang mencatatkan inflasi 3,34% (yoy). Inflasi triwulan II 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas bensin, ikan layang, cabai merah, bawang merah, dan telepon seluler. Inflasi komoditas bensin disebabkan oleh kenaikan harga BBM non-subsidi, terutama pertamax. Kenaikan komoditas hortikultura seperti cabai merah dan bawang merah disebabkan oleh keterbatasan pasokan seiring belum masuknya masa panen di tengah permintaan yang tetap konstan. Sementara itu, telepon seluler mengalami peningkatan harga disebabkan oleh kelangkaan dan kenaikan harga RAM, storage, dan chipset. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi sejumlah komoditas pangan seperti tomat seiring membaiknya pasokan setelah mengalami kenaikan harga selama 4 bulan berturut-turut dan telur ayam ras seiring masih berlimpahnya pasokan dari Jawa di tengah penurunan permintaan MBG. Secara tahunan, inflasi didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sebesar 39,26% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga emas global sebesar 28,21% (yoy). Memperhatikan perkembangan tersebut, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,56% (yoy), berada di atas rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Secara bulanan, inflasi di Sulsel terutama bersumber dari **Kelompok Transportasi**. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,41% (mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 0,25% (mtm) yang didorong oleh kenaikan harga komoditas bensin, seiring terjadinya peningkatan pertamax. Inflasi juga didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan inflasi sebesar 0,16% (mtm) yang dipengaruhi oleh kenaikan harga ikan layang, cabai merah, dan bawang merah. Selain itu, inflasi juga didorong oleh inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,58% (mtm) yang bersumber dari peningkatan harga telepon seluler tersebut disebabkan oleh kelangkaan dan kenaikan harga RAM, storage, dan chipset.

Tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada bulan Juli 2026 diperkirakan berada pada rentang -0,01% s.d. 0,39% (mtm). Adapun rata-rata inflasi bulan Juli dalam 3 (tiga) tahun terakhir 0,18% (mtm). Tekanan inflasi diperkirakan lebih landai dibanding periode sebelumnya. Hal ini didukung oleh tingginya hasil periode panen pada Maret-Mei 2026, tercermin dari stok beras yang mencapai 891 ribu ton. Ketersediaan pasokan tersebut diperkirakan membantu meredam tekanan inflasi. Selain itu, kebijakan penurunan penyaluran MBG dari 6 hari menjadi 5 hari per minggu dan peniadaan MBG selama periode libur sekolah diperkirakan akan turut menurunkan permintaan komoditas pangan, terutama telur ayam ras dan daging ayam ras. Lebih lanjut,

normalisasi konsumsi pasca libur sekolah, tidak adanya *long weekend*, serta masih berlakunya PPN DTP 100% hingga 5 Juli 2026 atas harga dasar dan *fuel surcharge* tiket pesawat domestik diperkirakan turut menekan inflasi. Lebih lanjut, kondisi gelombang laut pada Juli 2026 relatif kondusif pada kategori rendah-sedang (0-2,00 meter) sehingga dapat mendukung aktivitas perikanan tangkap. Dari sisi *administered prices*, penurunan harga minyak global (*brent oil*) ke level 71,74 USD atau turun 24,13% (mtm) seiring penetapan perjanjian US-Iran berpotensi dapat menahan inflasi yang lebih tinggi pada AP sebagaimana bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari penurunan harga beberapa BBM non subsidi dan avtur. Meskipun demikian, konflik Timur Tengah yang masih berlangsung dan PPN DTP 100% atas harga dasar dan *fuel surcharge* yang hanya berlaku hingga 5 Juli dari sebelumnya berlaku sepanjang Mei-Juni berpotensi menekan inflasi pada komoditas bensin dan angkutan udara. Selain itu, melemahnya nilai rupiah berpotensi mendorong risiko *imported inflation* dan tekanan terhadap stabilitas harga domestik pada Juli 2026. Namun demikian, ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis lainnya yang masih memadai sebagaimana tercermin pada neraca pangan Sulawesi Selatan yang sebagian besar berada pada kondisi surplus dapat menahan laju inflasi.

b. Perkembangan Harga Kebutuhan

b.1. Kelompok Transportasi pada triwulan II 2026 mencatatkan inflasi dengan andil 0,17% (andil mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi dengan andil sebesar 0,03% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini tercatat inflasi sebesar 1,41% (mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 0,25% (mtm). Tekanan inflasi terutama bersumber dari inflasi komoditas bensin akibat kenaikan harga pertamax, angkutan udara akibat seiring kenaikan *fuel surcharge* hingga 50%, dan pelumas/oli mesin disebabkan oleh meningkatnya biaya impor dan ongkos logistik global sebagai dampak pelemahan nilai rupiah. Namun, inflasi yang lebih tinggi pada kelompok ini tertahan oleh penerapan PPN DTP sebesar 100% pemerintah untuk tiket pesawat domestik sehingga menahan beban kenaikan harga tiket periode April-Juni dan insentif diskon tiket pesawat oleh pemerintah selama periode libur sekolah.

Secara tahunan, Kelompok Transportasi pada triwulan II 2026 mencatatkan inflasi sebesar 2,57% (yoy) dengan andil 0,32% (andil yoy). Realisasi ini lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,73% (yoy) dengan andil 0,09% (andil yoy). Peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh komoditas bensin (0,12%; andil yoy), pelumas/oli mesin (0,06%; andil yoy), dan angkutan udara (0,05%; andil yoy).

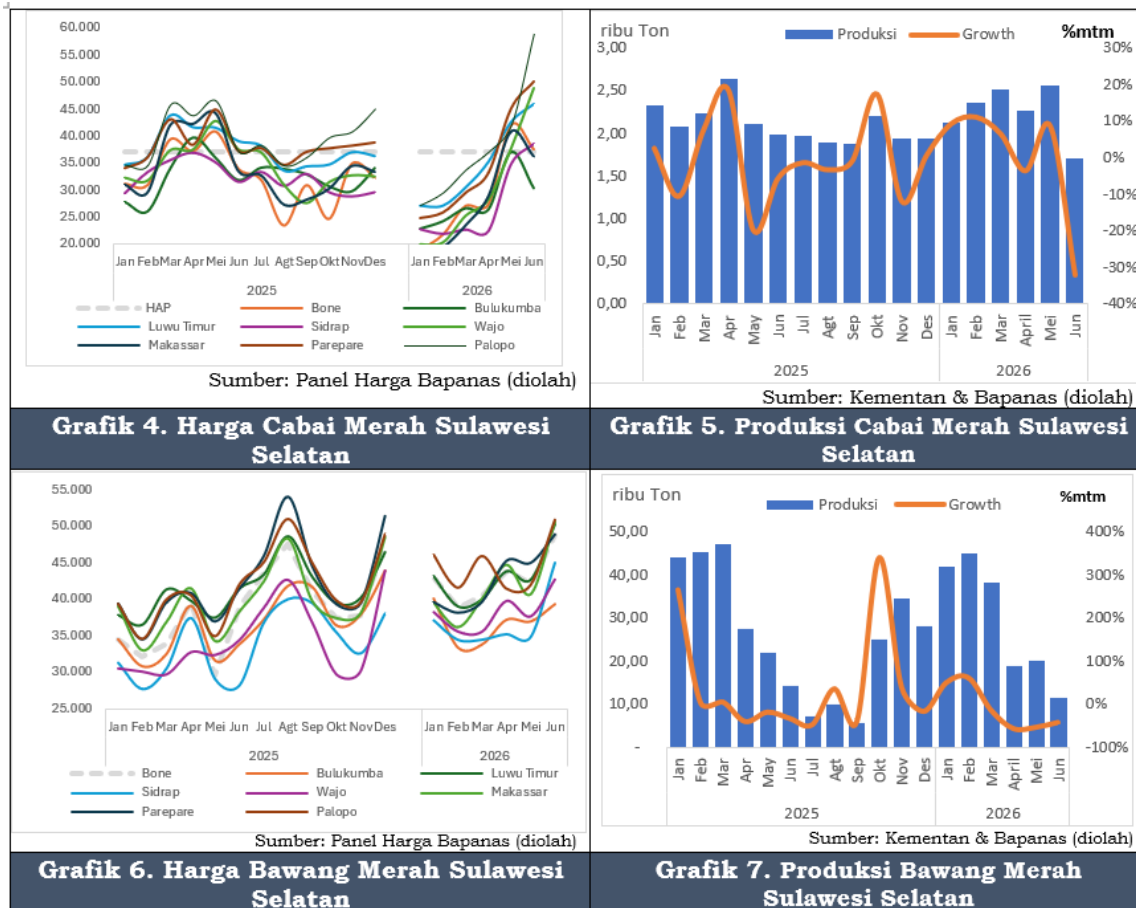
b.2. Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan pada triwulan II 2026 memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,04% (andil mtm), lebih tinggi dari realisasi triwulan I 2026 yang mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,01% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm). Inflasi pada kelompok ini terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas telepon seluler yang mencatat inflasi sebesar 4,88% (mtm) dengan andil sebesar 0,03% (andil mtm). Kenaikan harga

komoditas tersebut disebabkan oleh kelangkaan dan kenaikan harga RAM, storage, dan chipset.

Secara tahunan, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan pada triwulan II 2026 mencatatkan inflasi sebesar 1,64% (yoy) dengan andil 0,10% (andil yoy), lebih tinggi dari realisasi Mei 2026 yang sebesar 1,01% (yoy) dengan andil 0,06% (andil yoy). Telepon seluler menjadi komoditas penyumbang inflasi utama sebesar 11,14% (yoy) dengan andil sebesar 0,07% (andil yoy).

b.3. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan II 2026 memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,05% (andil mtm), lebih rendah dibanding realisasi triwulan I 2026 yang mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,61% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini tercatat inflasi sebesar 0,16% (mtm), lebih tinggi dari sebelumnya yang tercatat deflasi -0,47% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas ikan layang (0,05%; andil mtm), cabai merah (0,05%; andil mtm), bawang merah (0,04%; andil mtm), dan beras (0,02%; andil mtm). Kenaikan harga komoditas pangan strategis terjadi seiring keterbatasan pasokan seiring belum masuknya masa panen pada daerah sentra di tengah permintaan yang tetap konstan. Biaya plastik yang meningkat juga turut menjadi sumber kenaikan inflasi pada komoditas beras. Selain itu, komoditas **Minyak Goreng** juga menjadi penyumbang inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Juni 2026. Minyak goreng mencatatkan inflasi 2,40% (mtm) dengan andil sebesar 0,03% (andil mtm). Peningkatan harga tersebut sejalan dengan kenaikan harga CPO dan harga plastik kemasan sehingga meningkatkan biaya input produksi.

Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada komoditas tomat (-0,11%; andil mtm), telur ayam ras (-0,05%; andil mtm), ikan bandeng (-0,01%; andil mtm), dan udang basah (-0,01%; andil mtm). Penurunan harga tomat, ikan bandeng, dan udang basah terjadi seiring ketersediaan pasokan akibat meningkatnya produksi di daerah sentra yang didukung oleh cuaca yang kondusif. Telur ayam mengalami penurunan harga akibat pasokan yang masih berlimpahnya pasokan dari Jawa seiring penurunan permintaan MBG akibat pengurangan penyaluran MBG menjadi 5 hari per minggu dan *freeze periode* pada 136 SPPG di Sulsel.



Secara tahunan, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Juni 2026 menjadi penyumbang inflasi tertinggi sebesar 5,69% (yoy) dengan andil mencapai 1,77% (andil yoy). Tekanan inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 5,40% (yoy) dengan andil mencapai 1,68% (andil yoy). Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan terutama disumbangkan oleh ikan layang, tomat, beras, cabai rawit, daging ayam ras, dan minyak goreng. Adapun beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi, antara lain ayam hidup, bawang putih, dan wortel.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan III 2026 diperkirakan berada pada rentang -0,36% s.d. 0,04% (mtm). Tekanan inflasi diperkirakan lebih landai dibanding periode sebelumnya. Hal ini didukung oleh masuknya periode panen gadu pada triwulan III 2026. Selain itu, kebijakan penurunan penyaluran MBG dari 6 hari menjadi 5 hari per minggu dan peniadaan MBG selama periode libur sekolah diperkirakan akan turut menurunkan permintaan komoditas pangan, terutama telur ayam ras dan daging ayam ras. Lebih lanjut, normalisasi konsumsi pasca libur sekolah, tidak adanya *long weekend*, serta masih berlakunya PPN DTP 100% hingga 5 Juli 2026 atas harga dasar dan *fuel surcharge* tiket pesawat domestik diperkirakan turut

menekan inflasi. Lebih lanjut, kondisi gelombang laut diperkirakan relatif kondusif (Juli 2026) sehingga dapat mendukung aktivitas perikanan tangkap. Dari sisi *administered prices*, penurunan harga minyak global (*brent oil*) ke level 71,74 USD atau turun 24,13% (mtm) seiring penetapan perjanjian US-Iran berpotensi dapat menahan inflasi yang lebih tinggi pada AP sebagaimana bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari penurunan harga beberapa BBM non subsidi dan avtur. Meskipun demikian, konflik Timur Tengah yang masih berlangsung dan PPN DTP 100% atas harga dasar dan *fuel surcharge* yang hanya berlaku hingga 5 Juli dari sebelumnya berlaku sepanjang Mei-Juni berpotensi menekan inflasi pada komoditas bensin dan angkutan udara. Namun demikian, ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis lainnya yang masih memadai sebagaimana tercermin pada neraca pangan Sulawesi Selatan yang sebagian besar berada pada kondisi surplus dapat menahan laju inflasi.

Komoditas	Neraca (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Ketahanan Stok (Hari)
Beras	1272521	1356628	84107	454
Jagung	667339	761910	94570	206
Kedelai	-8400	-4071	4329	-58
Bawang Merah	43602	46213	2612	490
Rawang Putih	3999	4658	1460	56
Cabai Besar	628	1749	1121	17
Cabai Rawit	70	2353	2283	1
Daging Sapi / Kerbau	20217	22143	1926	315
Daging Ayam Ras	50000	58271	8271	181
Telur Ayam Ras	51575	60715	9140	71
Gula Pasir	3029	11494	8465	11
Minyak Goreng	19451	26035	6584	89

Sumber: Bapanas, diolah

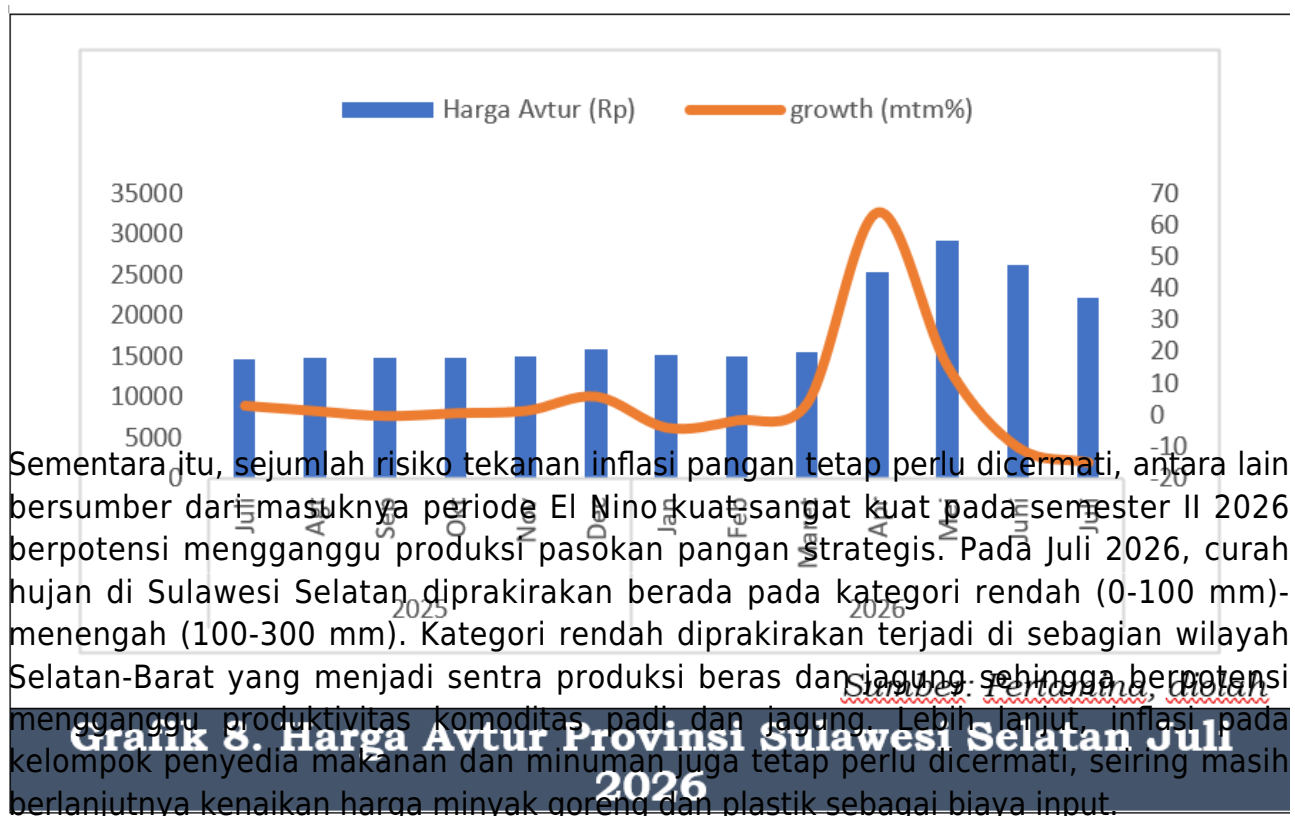
Tabel 4. Neraca Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Juli 2026

Dari sisi transportasi, potensi penyesuaian harga bensin nonsubsidi seiring konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung berisiko kembali mendorong tekanan inflasi pada triwulan III 2026, meskipun terdapat penurunan pada Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamina Turbo. Lebih lanjut, risiko *imported inflation* akibat pelemahan nilai rupiah berpotensi menekan harga komoditas transportasi lainnya seperti oli, *sparepart* kendaraan, mobil, dan sepeda motor.

No .	Jenis BBM	Harga (Rp/liter)		Perubahan (m tm)
		Jun-26	Jul-26	
1	Pertam ax	16.250	16.650	2,46%
2	Pertam ax Turbo	21.200	19.750	-6,84%
3	Dexlite	23.500	20.150	-14,26%
4	Pertam ina Dex	25.350	21.650	-14,60%
5	Pertam ax diPertashop	16.550	16.550	0,00%

Sumber: Pertamina, diolah

Tabel 5. Harga BBM Non-subsidi Provinsi Sulawesi Selatan Juli 2026



3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan sejumlah upaya pengendalian harga pangan selama Triwulan II 2026, sebagai berikut:

K1. KETERJANGKAUAN HARGA

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota, khususnya pada HBKN.
2. Sidak pasar, gudang distributor, dan gudang BULOG dalam rangka pemantauan harga.
3. Koordinasi aktif antara TPID dengan *stakeholders* dalam *review* kebijakan *Administered Prices* di daerah.
4. Mendorong pemanfaatan dana APBD untuk program pengendalian inflasi dan Dana Desa untuk program ketahanan pangan.

K2. KETERSEDIAAN PASOKAN

1. Peningkatan produksi pangan melalui Program Luas Tambah Tanam, mandiri benih, perbaikan irigasi, termasuk implementasi varietas benih unggul.
2. Dukungan/fasilitasi alat dan mesin penunjang produksi melalui penyaluran PI-KEKDA, termasuk penerapan *digital farming* hulu pada komoditas padi maupun hortikultura (bawang merah dan cabai) untuk efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas.
3. Gerakan Menanam Pangan Strategis di lingkungan kerja/pekarangan kosong (*urban farming*), misalnya Gerakan Tanam Cabai oleh ASN di Luwu Timur, Barru, Selayar Gemerlap, Gemoih di Bulukumba, dan Jeneponto Bahagia (cabai, bawang merah).
4. *Launching* Gerakan Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Barru pada lahan tadah hujan seluas 180 hektar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

K3. KELANCARAN DISTRIBUSI

1. Implementasi program SIPEPPA, yakni program kerja sama antara Pemerintah dan toko ritel untuk distribusi bahan pangan. Untuk tahun ini, akan didorong perluasan pada beberapa ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.
2. Penandatanganan MoU KAD, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Optimalisasi program *Mini Distribution Center (MDC)* untuk menyediakan kebutuhan pangan strategis masyarakat dengan harga terjangkau sesuai HET pada beberapa pasar di kota IHK dan akan diperluas pada kota-kota non-IHK lainnya.
4. Program peningkatan pemasaran digital (*digital farming* sisi hilir) melalui program *onboarding* UMKM pangan pada platform *e-commerce/social commerce*.

K4. KOMUNIKASI EFEKTIF

1. HLM untuk stabilisasi harga pangan secara reguler di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya untuk sinergi bersama program pengendalian inflasi pada momen HBKN.
2. Kegiatan edukasi perkembangan inflasi kepada masyarakat melalui media (siaran pers, media sosial, *media gathering*, *talk show*, dan lainnya).
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 dan tetap terjaga dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Dari sisi permintaan, perbaikan daya beli masyarakat diperkirakan mendorong peningkatan konsumsi, sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7,2%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP tahun 2024 yang sebesar 6,5%. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan mencapai 100% penerima dari total target pada tahun 2026 juga turut meningkatkan permintaan pangan

strategis, meskipun terdapat kebijakan pengurangan penyaluran dari 6 hari menjadi 5 hari per minggu. **Dari sisi administered prices**, tekanan inflasi bersumber dari penyesuaian harga BBM dan LPG nonsubsidi seiring gangguan pasokan minyak global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. **Dari sisi pasokan**, produktivitas beberapa komoditas pangan strategis berpotensi terganggu sejalan dengan kondisi ENSO yang diperkirakan akan memasuki El Nino kuat-sangat kuat pada semester II 2026 yang memberikan iklim kering. Meskipun demikian, El Nino diperkirakan dapat mendukung produksi komoditas hortikultura dan perikanan dengan adanya fenomena *upwelling*. Selain itu, kondisi ENSO yang berada pada fase La Nina lemah yang bertahan hingga pertengahan tahun 2026 dapat mendukung produktivitas komoditas pangan. Sementara itu, perbaikan produksi padi yang terus berlanjut pada 2026 juga diperkirakan mampu menjaga ketahanan pasokan Sulsel. Produksi padi Sulsel tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,87 juta ton-GKG, atau meningkat 8,71% (yoy). Sejumlah **kebijakan Pemerintah** yang turut mendukung pengendalian inflasi terus berlanjut. Pada 2026, Pemerintah kembali berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sebesar 720 ribu ton kepada sekitar 18 juta PBP secara nasional yang akan disalurkan selama empat bulan pertama, sehingga turut menopang daya beli masyarakat dan menahan tekanan permintaan di pasar. Keberlanjutan program SPHP beras dengan peningkatan batas maksimal pembelian menjadi 25 kg per konsumen, serta penyaluran Minyakita juga diperkirakan mampu menjaga kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas tersebut. Selain itu, peningkatan target penyaluran SPHP jagung sebesar 372% (yoy) dari realisasi tahun 2025 diperkirakan dapat menjaga stabilitas harga jagung pakan, menekan biaya produksi peternak unggas, dan mendukung stabilitas harga telur serta daging ayam ras. Efisiensi program MBG dengan penurunan hari penyaluran, rencana pengurangan target penerima, dan efisiensi anggaran berpotensi menahan inflasi pangan yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya akibat MBG. Namun demikian, sejumlah **faktor risiko** inflasi pangan masih perlu dicermati, seiring prakiraan potensi dampak El Nino kuat, berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Luwu Utara sebagai sentra padi, serta Kabupaten Enrekang sebagai sentra bawang merah, sehingga dapat memicu fluktuasi harga komoditas segar. Ketidakpastian eksternal juga masih perlu diwaspadai, terutama terkait potensi eskalasi perang antara AS-Iran-Israel, berlanjutnya potensi perdagangan global, serta risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pergerakan harga komoditas internasional, meningkatkan risiko *imported inflation*, dan memberikan tekanan terhadap prospek inflasi ke depan.

Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan stabilitas harga. Pemerintah berkomitmen mendukung pencapaian swasembada pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), peningkatan infrastruktur pertanian, serta modernisasi sektor agribisnis. Penguatan produksi dan serapan beras terus didorong, sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi beras nasional pada tahun 2026 serta rencana peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton, yang diharapkan mendukung stabilitas harga beras. Dalam konteks Sulawesi Selatan, dukungan

penguatan hulu pertanian tercermin dari alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sebesar 846.721 ton, meningkat 27,65% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan produksi padi didukung oleh program Mandiri Benih yang kembali berjalan pada 2026 dengan total penyaluran benih padi unggul sebanyak 2,31 juta kg, meningkat 84,8% dari alokasi tahun 2025 sebanyak 1,25 juta kg. Bantuan benih tersebut akan diberikan secara gratis kepada petani di seluruh kab/kota se-Sulsel dengan total luasan lahan penerima sebesar 92.334 Ha, meningkat 84,69% dari alokasi tahun 2025 sebesar 50.000 Ha. Selain itu, penetapan kebijakan dan insentif pemerintah melalui penguatan regulasi dan insentif fiskal, antara lain pengetatan implementasi DMO Minyakita minimal 35% melalui Permendag No. 43 Tahun 2025, peningkatan batas maksimal penyaluran beras SPHP menjadi 25 kg (5 pax) per konsumen, serta perluasan SPHP jagung guna memperkuat pasokan dan stabilitas harga pangan, serta pemberian insentif PPN DTP 100% untuk pembelian properti berdasarkan PMK No. 90 Tahun 2025. Sementara itu, pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas SABER) melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 4/2026 memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan harga dan mutu komoditas strategis, sehingga diharapkan harga pangan lebih terkendali dan tekanan inflasi dapat diredam. Selanjutnya, upaya pengendalian harga oleh TPID se-Sulawesi Selatan tetap dilaksanakan dalam kerangka strategi 4K sepanjang tahun 2026, melalui implementasi berbagai program unggulan GPIPS, seperti operasi pasar, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), *urban farming*, pengembangan klaster pangan, *High Level Meeting* (HLM), serta penguatan kelancaran distribusi. Sinergi kebijakan tersebut diperkirakan mampu menjaga inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pasokan pangan diperkirakan terjaga seiring upaya pengendalian harga oleh TPID dalam kerangka strategi 4K disertai dengan program unggulan GNPIP, yakni operasi pasar, Kerjasama Antar Daerah, *urban farming*, pengembangan klaster, *High Level Meeting*, dan kelancaran distribusi. Kegiatan Gelar Pangan Murah dan *Mini Distribution Center* (MDC) juga akan berlanjut sampai dengan akhir tahun dengan melibatkan distributor komoditas pangan.

Strategi khusus sebagai upaya menjaga stabilisasi harga di Sulsel ke depan, antara lain:

1. Melaksanakan GPM dgn prinsip “4T” - tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat komoditas secara masif dengan fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi pada HBKN Ramadhan Idul Fitri dan berada di atas HET, seperti beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir.
2. Mengoptimalkan KAD untuk komoditas utama penyumbang inflasi dengan memanfaatkan data neraca pangan dan prakiraan BMKG, menyiapkan *buffer stock* sebagai antisipasi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem, serta menerbitkan Perda terkait Cadangan Pangan untuk menjaga ketahanan pasokan.
3. Memastikan kelancaran distribusi dan penyerapan beras SPHP dan Minyakita melalui koordinasi Bulog dan Pemda/Pemkot, khususnya pada daerah defisit dan

berada di atas HET.

4. Mendorong penggunaan BTT untuk bantuan ongkos angkut komoditas inflasi, mendorong *moral suasion* & komunikasi publik Belanja Bijak, dan mengoptimalkan program *urban farming* untuk menanam barito (bawang, rica/cabai, tomat) di lahan/pekarangan kosong.
5. Melanjutkan Program Mandiri Benih dan penyediaan bibit unggul, serta optimalisasi lahan kosong melalui program *urban farming* untuk komoditas bawang merah, rica/cabai, tomat (barito) di pekarangan, lahan sekolah, dan pesantren guna memperkuat ketahanan pangan lokal.
6. Memanfaatkan teknologi pascapanen, seperti sinar gamma dan ozonisasi guna memperlambat pembusukan produk hortikultura.
7. Menyediakan *cold storage* di lokasi pendaratan ikan (PPI) serta pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan ikan hasil tangkapan.
8. Mendorong kerja sama antara petani dan *offtaker* melalui pola kontrak yang disupervisi pemerintah daerah, guna memastikan penyerapan hasil produksi dan stabilitas harga.
9. Melakukan pengkinian Website Neraca Pangan oleh Pemerintah Kota/Kab dengan data yang andal (*reliable*) dan terkini (*timely*), khususnya dalam pencatatan arus keluar komoditas pangan, guna mendukung perumusan kebijakan yang efektif dan dasar faktual untuk melakukan kerja sama ketahanan pangan antar daerah.
10. Menambah pasokan dan memastikan kelancaran distribusi Minyak Kita karena hampir seluruh kab/kota di Sulsel berada di atas